

**BiMA**

POLICY BRIEF

Kebijakan Pertanian Inklusif Berbasis Kolaborasi: Langkah Strategis untuk Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya

HIBAH PENELITIAN SKEMA FUNDAMENTAL REGULER

Nomor Kontrak Induk :
Nomor: 117/C3/DT.05.00/PL/2025

Nomor Kontrak Turunan :
Nomor: 22/UN59.L1/AL.04/PL/2025

Tim Penulis:
Universitas Teuku Umar

- Nellis Mardhiah/0108058501
- Putri Kemala Sari/0019059002
- Agus Pratama/0018089107
- Agatha Debby Reiza
Macella/0023029004
- Safrida/1312059001

Policy Brief ini ditujukan untuk:

Pemerintah Daerah Kabupaten
Nagan Raya

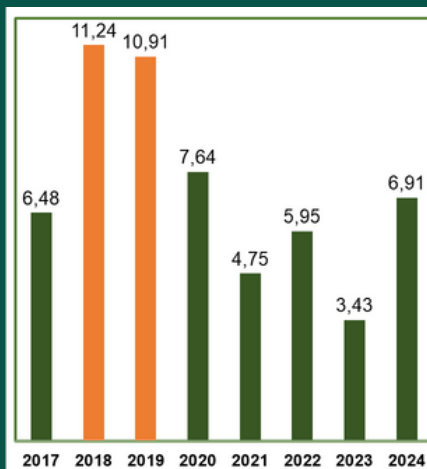
RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan pertanian padi secara inklusif merupakan langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memajukan sektor pertanian Nagan Raya yang berkelanjutan. Dinamika model ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat dan petani kecil hanya sebagai penggarap dan penyewa tidak memiliki lahan. Namun dengan demikian, secara terintegrasi ke dalam rantai nilai untuk memenuhi kebutuhan harapan hidup. Sinergitas kebijakan secara inklusif sangat urgen di Kabupaten Nagan Raya sebagai wilayah basis ekonomi masyarakat petani untuk meningkatkan pendapatan, memperkuat ketahanan pangan, mengurangi angka kemiskinan ekstrem dipedesaan. Pelaksanaan kebijakan tersebut dengan pendekatan secara fragmentasi untuk membangun reformasi agrikultur yang berbasis pertanian inklusif tidak hanya sebatas program pemberdayaan secara sosial bersifat bantuan, namun membangun ekonomi cerdas melalui petani kecil yang secara vitalitas dalam sistem pangan yang berkelanjutan. Urgensi pertanian inklusif ini untuk meningkatkan solidaritas antar berbagai pemangku kepentingan yang berkolaborasi secara erat dan terstruktur, dimana pemerintah, sektor swasta, Organisasi masyarakat sipil dan lembaga adat Keujreun Blang bersinergi dengan keunggulan masing-masing pihak demi kepentingan bersama. Maka oleh karena itu, kebijakan sinergitas dalam tata kelola pertanian inklusif yang berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya memerlukan akses strategi modalitas sosial melalui rencana program prioritas kebutuhan para petani yang berkelanjutan dan penguatan kelompok tani melalui penyuluh aktif sesuai dengan optimalisasi kebijakan, pola tanam serentak, dan jadwal turun sawah serentak, serta memfasilitasi kemitraan secara intensif dan berkala antar pemangku kepentingan untuk membangun pertanian inklusif di Kabupaten Nagan Raya.



PENDAHULUAN

Pertanian inklusif merupakan pengembangan kapasitas masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam meningkatkan pembangunan SDGs (Allen et al., 2022). Hal ini termasuk komunitas, organisasi dan pemerintah daerah. Pembangunan pertanian inklusif merupakan isu yang bernuansa dan multidimensional. Sasaran pembangunan inklusif ini dapat mendorong inovasi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan yang terus berubah, seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, atau gangguan rantai pasok. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai dinamika alasan substansial bantuan pembangunan inklusif masih sulit dipahami (Allen et al., 2022). Alasan substansial dalam sasaran pertanian inklusif yaitu, peserta kelompok tani yang terpinggirkan dari dana bantuan pemerintah dan mendapatkan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi yang berkelanjutan (Krysovatty et al., 2024). Salah satu negara sebagai produsen pertanian terkemuka adalah Indonesia. Maka oleh karena itu sebagai negara berkembang harus dapat mencapai sasaran kontribusi sektor pertanian padi khususnya tanaman pangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertanian merupakan masih menjadi tulang punggung perekonomian Aceh. Laju Pertumbuhan perekonomian Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga tidak menunjukkan perubahan berarti. Hal ini terjadi karena lahan sawah yang belum terpetakan dan mengalami alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan, permukiman dan sarana infrastruktur lainnya. Penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi gabah di Kabupaten Nagan Raya mengalami produksi padi (BPS Provinsi Aceh, 2024).



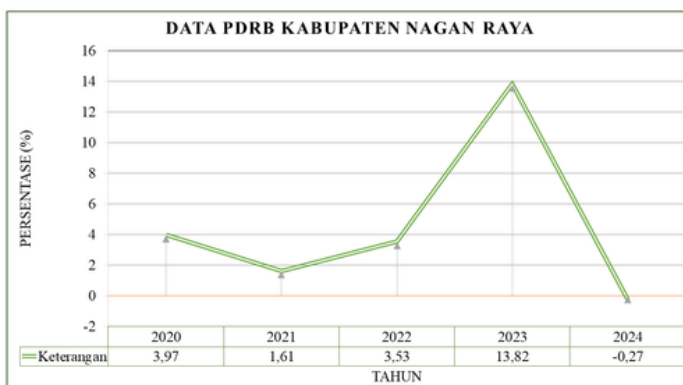
Dinas pangan Aceh pada tahun 2024 telah mencatat bahwa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) untuk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 belum tersedia secara spesifik dalam informasi yang tersedia. Namun, berdasarkan data tahun 2023, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (PoU) di Nagan Raya adalah 3,43%, yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Selain itu, Nagan Raya juga tercatat sebagai salah satu wilayah dengan prevalensi ketidacukupan pangan terendah di Aceh pada tahun 2024. Prevalensi ketidacukupan pangan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh mencapai 6,91% pada 2024. Rata-rata PoU Indonesia sebesar 8,27% pada 2024. Sehingga PoU di Kabupaten Nagan Raya lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Keadaan tersebut menunjukkan masih belum maksimal dalam menciptakan pertanian inklusif.

Gambar 1. Grafik PoU Nagan Raya



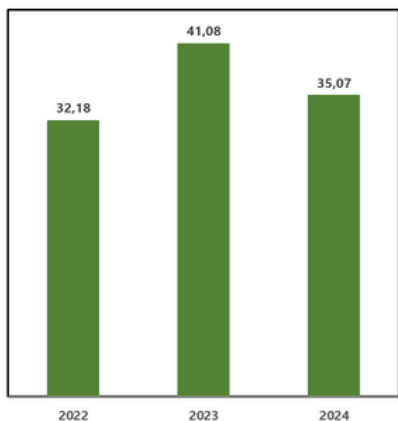
DESKRIPSI MASALAH

Kabupaten Nagan Raya menempatkan isu pertanian padi sebagai skala prioritas dalam sasaran pencapaian pembangunan SDGs. Sasaran dalam pembangunan pertanian padi secara inklusif terlibat semua unsur kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani (Ilar et al., 2021). Petani inklusif ini terutama petani kecil hanya sebagai penggarap dan penyewa agar dapat dipastikan masuk kedalam rantai nilai kehidupan yang sangat signifikan dapat menghambat pertanian yang berkelanjutan. Akses dalam kewujudan petani inklusif ini adalah aktor pemberdayaan petani yang berbasis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani demi kewujudan ketahanan pangan secara optimal (Ngarawula & Wahyudi, 2023). Menurut PDRB Kabupaten Nagan Raya dari hasil survey lapangan usaha Laju Pertumbuhan Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2020–2024. Pada pertumbuhan tahun kategori 2024, laju pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya mencapai -0,27 %. Angka ini menurun dari laju pertumbuhan pada tahun 2023 yang mencapai 13,82 %. Hal ini sebagaimana dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 2. Data PDRB Kabupaten Nagan Raya

Hal ini sangat selaras dengan Rencana Pembangunan Nagan Raya tahun 2023–2026 dalam indeks PDRB Kabupaten Nagan Raya Pertanian dan Peternakan. Yang menjadi paling dominan menyumbang adalah sektor pertanian padi dan menjadi yang terbesar di wilayah barat selatan Aceh. Maka oleh karena itu, Kabupaten Nagan Raya menempatkan isu pertanian menjadi salah satu isu prioritas dalam sektor pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 3. Grafik Produktivitas Padi di Nagas Raya 2022–2024

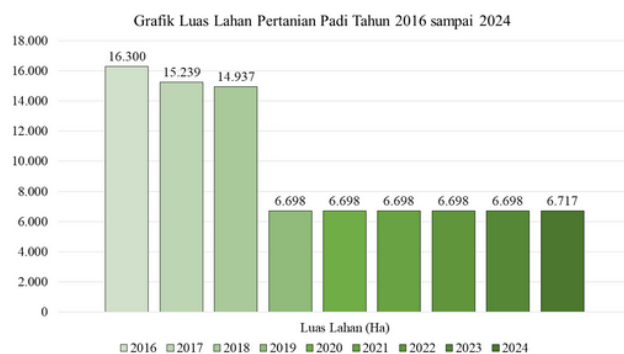
Grafik tersebut terlihat sempat mengalami kenaikan di tahun 2023, namun penurunan signifikan terjadi di tahun 2024 dan di klaim terus turun pada 2025. Hal ini dibuktikan dari subround data produksi padi pada Januari–April 2024 yang berkisar 16,97 dibandingkan dengan data pada Januari–April 2025 yang hanya 8,07 (Badan Pusat Statistik, 2024). Nilai tukar petani Nagas Raya pun mengalami penurunan 0,80% dibandingkan bulan sebelumnya (Fajri R, 2025). Linear dengan hal tersebut, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nagas Raya juga masih jauh berada di urutan 226 dari 416 kabupaten dengan persentase 76,29% pada 2023 (Badan Pangan Nasional, 2025). Model kebijakan ini dapat diwujudkan agar dapat meningkatkan sistem pertanian dan ketahanan pangan para petani kecil (Davis et al., 2024). Sasaran pertanian inklusif dengan pendekatan secara partisipatif secara modalitas sosial melalui reformasi agrikultur sebagai target dalam mencapai inovasi pertanian inklusif berbasis kolaborasi secara heterogen baik akademisi, pemerintah dan pihak swasta serta kelembagaan masyarakat dan unsur nilai kearifan lokal dengan satu tujuan.

SOLUSI ALTERNATIF

1. Optimalisasi Program Kebijakan Pertanian Inklusif

Pelaksanaan kebijakan pertanian inklusif harus dioptimalkan melalui program kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan Di Kabupaten Nagas Raya. Qanun kabupaten Nagas Raya Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pola Tanam Dan Jadwal Turun Sawah Serentak dan Qanun Kabupaten Nagas Raya Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan. Kedua qanun ini memerlukan pendekatan komprehensif secara terstruktur. Tujuan nya adalah untuk memastikan dapat dirasakan disemua lapisan masyarakat baik kelompok petani miskin, dan lembaga adat petani memiliki akses yang sama dalam peluang ekonomi. Qanun Kabupaten Nagas Raya Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 7 dan 8 tentang Musim Tanam (MT) Rendengan/Penghujan dilaksanakan bulan Oktober sampai dengan bulan Maret serta Musim Tanam (MT) Gadu/kemarau (Bulan April sampai dengan Bulan September). Mekanisme ini dibentuk secara terstruktur dan dikontrol secara intensif oleh Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.

Sedangkan Qanun Nomor 5 Tahun 2024 terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan suatu sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Terdapat dua pertimbangan dari perlindungan lahan pangan yang berkelanjutan, terkait perlindungan luas lahan dan minat petani milenial yang harus ditingkatkan. Berikut luas lahan pertanian di Kabupaten Nagas Raya seperti pada gambar 4.



Gambar 4. Grafik Luas Lahan Pertanian Padi Tahun 2016–2024

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa lahan pertanian padi di Kabupaten Nagas Raya sejak tahun 2016 hingga saat ini semakin mengalami penurunan akibat adanya pengalihan fungsi lahan. Sehingga berdampak negatif baik kepada petani sendiri, masyarakat maupun ketahanan pangan secara umumnya. Hal ini disebabkan penurunan produksi pertanian di Kabupaten Nagas Raya. Selain pada pengalihan fungsi lahan, terdapat pula penurunan minat petani muda di Aceh termasuk Nagas Raya yang masih perlu ditingkatkan. Tantangan seperti keterbatasan lahan dan kurangnya perhatian terhadap rantai pemasaran serta stabilitas harga membuat profesi petani kurang diminati. Data sensus pertanian menunjukkan bahwa sebagian besar petani milenial belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Maka dengan demikian harus membentuk model pertanian inklusif yang aplikatif, kontekstual dan kondisional. Serta mempertimbangkan karakteristik kearifan lokal sesuai dengan kebutuhan kelompok tani dan lembaga ada keujreun blang. Selain itu juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan secara adaptif dengan tujuan agar terorganisir produktivitas padi berkelanjutan. Terdapat beberapa program pemberdayaan yang inklusif dalam optimalisasi program kebijakan pertanian inklusif di Kabupaten Nagas Raya, sebagai berikut:

Pendekatan True Cost Accounting

Pendekatan ini merekomendasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya harus menyusun indikator pengukuran biaya secara komprehensif dari sistem pangan dan sistem lingkungan serta biaya sosial dengan mempertimbangkan nilai komoditas utama (FAO, 2024) yang diinternalisasikan dalam kebijakan RPJM dan RPK khususnya pada sektor pertanian termasuk insentif lembaga adat keujruen blang, pengelolaan pertanian kecil (pengarap dan penyewa) melalui kerjasama mitra terkait.

Manajemen Data Pertanian Berbasis Teknologi Cerdas

Seluruh data terkait pertanian seperti luas lahan, data kelompok tani, produksi dan produktivitas padi, kondisi tanah dan hal lainnya terkait ilmu pertanian terintegrasi satu aplikasi tertentu yang dapat diakses oleh publik sehingga memudahkan proses kontrol oleh pemerintah daerah sehingga kebijakan pertanian menjadi tepat sasaran.

Optimalisasi Kelembagaan Adaptif dan Mitra Strategi

Pendekatan ini merupakan dukungan pemerintah secara eksplisit pada kelembagaan lokal pertanian secara inklusif seperti koperasi petani yang melibatkan melibatkan pemerintah dan masyarakat (Dewi, 2020). Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat agraris

Peningkatan Kapasitas Petani

Pendekatan kemampuan petani melalui pelatihan secara komprehensif melalui sekolah lapang petani (United Nation Development Program, 2024) yang diselenggarakan secara intens dan merata sesuai dengan kriteria yang telah di atur.

2. Kolaborasi Civil Society secara Integratif berkelanjutan

Pada proses pengembangan kebijakan pertanian inklusif yang terintegrasi, membutuhkan peranan multi-sektor yang optimal. Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk mencapai sinergitas yang maksimal melalui koordinasi dan penguatan peranan sesuai tugas dan pokok masing-masing pihak stakeholder, diantaranya ialah:



Pemerintah Daerah berwenang dalam merumuskan kebijakan dan penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan pertanian yang inklusif, maka dari itu pemerintah harus berkoordinasi dan bersinergi secara intens dengan seluruh pemangku kepentingan melalui: pengarahannya kebijakan berfokus kemitraan, ruang partisipasi perencanaan kegiatan serta regulasi partisipasi stakeholder dalam sektor pertanian padi di Nagan Raya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan secara vital dalam menciptakan sistem pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan. LSM juga berperan penting pengembangan pertanian padi dengan memberdayakan petani melalui pelatihan berbasis inklusif dan berkelanjutan, memberikan aspirasi kepentingan petani kecil, memfasilitasi akses kebutuhan petani secara adil, melakukan pengawasan secara independen terhadap pelaksanaan kebijakan pertanian inklusif di Kabupaten Nagan Raya. dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Lembaga Adat Keujruen Blang sebagai kearifan lokal Aceh yang memiliki peran dalam sektor pertanian seperti pelestarian adat pertanian padi, penyelesaian konflik petani, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Swasta berkontribusi dalam menyediakan teknologi dan inovasi seperti benih unggul dan alat pertanian modern, membuka akses pasar secara adil melalui kemitraan yang menjamin harga dan pasokan beras, serta menyediakan investasi atau modal untuk operasional petani, dan mensinergikan dana CSR dengan Rencana pembangunan Nagan Raya di sektor pertanian padi.

Petani memegang peranan krusial dalam pengembangan pertanian padi yang inklusif. Tidak hanya sebagai produsen, melainkan juga sumber utama pengetahuan lokal, serta mitra penting dalam merumuskan dan menguji coba teknologi pertanian. Berpartisipasi aktif dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan relevansi dan efektifitas kebijakan pertanian, meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan kolektif melalui jaringan sosial seperti kelompok tani.

Akademisi memiliki kemampuan dalam menciptakan sebuah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diaplikasikan dalam sektor pertanian padi di Nagan Raya seperti pengembangan teknologi pertanian, penelitian dan pengamatan secara komprehensif dalam sektor pertanian, pemberdayaan petani serta inovasi pertanian, Hal tersebut menjadi rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan pertanian padi secara inklusif dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Petani

Pengurangan angka kemiskinan petani memerlukan pendekatan multidimensional yang terstruktur mencakup kebijakan ekonomi sosial dan kelembagaan secara berkelanjutan (Yusriadi, 2024). Hal ini terdapat beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin yang berfokus pada optimalisasi sumberdaya lokal seperti, penetapan standar kualitas benih padi sesuai dengan PH tanah, serta peningkatan sarana dan prasarana air, penguatan kemitraan dengan lembaga lokal melalui BUMG untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat berkelanjutan, serta penguatan melalui kebijakan stabilitas harga dan perlindungan sosial kepada petani secara inklusif. Hal tersebut dapat mencegah kegagalan panen sehingga dapat mewujudkan kemandirian petani.

4. Peningkatan Akses Modalitas Sosial yang Berkeadilan

Upaya pemerintah dalam peningkatan akses modalitas yang berkeadilan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan para petani kecil hanya sebagai penggarap dan penyewa lahan (FAO, 2024). Hal ini dimana petani miskin diupayakan tidak hanya penerima manfaat secara pasif akan tetapi sebagai aktor utama dalam pertumbuhan pertanian berkelanjutan (Tong et al., 2024). Dalam konteks sosial berkeadilan para petani mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh infrastruktur pertanian padi secara partisipatif dan terstruktur secara komprehensif. Ada 6 Pilar model dapat ditawarkan dalam peningkatan akses modalitas sosial berkeadilan bagi pertanian inklusif di Nagan Raya yaitu: **Pertama)** Peningkatan akses informasi, pengetahuan, dan kontrol penyuluhan pertanian dalam program tanam serentak sesuai dengan prinsip inklusif dan berkelanjutan. **Kedua)** Peningkatan partisipasi multi sektor pertanian dalam proses pengambilan keputusan. **Ketiga)** Pembentukan koperasi petani yang terintegrasi dengan koperasi merah putih yang berbasis Potensi Desa. **Keempat)** Optimalisasi implementasi Qanun Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Nagan Raya untuk melindungi lahan pertanian padi dan lahan produktif lainnya secara tegas dan holistik. **Kelima)** Peningkatan kerjasama pihak industri melalui dana CSR agar akses pemodal petani lebih luas demi kemandirian petani. **Keenam)** Peningkatan partisipasi petani muda dengan pemikiran yang inovatif dan keterbukaan terhadap penggunaan teknologi berkelanjutan.

REKOMENDASI

Berdasarkan empat alternatif solusi yang ditawarkan dalam strategi mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Nagan Raya, maka penulis juga menawarkan beberapa rekomendasi diantaranya ialah: **Pertama)** Adanya penetapan skala prioritas kebutuhan petani kecil dalam perencanaan program lebih terukur dan terarah sesuai dengan indikator kebutuhan masyarakat petani miskin. **Kedua)** Dibutuhkan peningkatan kontrol penyuluh dengan mekanisme yang terstruktur sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pola Tanam Dan Jadwal Turun Sawah Serentak di Nagan Raya, **Ketiga)** Peningkatan program pembemdayaan petani melalui sekolah lapang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. **Keempat)** Penguatan kelembagaan lokal melalui kperasi petani maupun BUMG dimasa yang akan datang. **Kelima)** Menetapkan kebijakan pendukung perlindungan sosial dengan kondisi perubahan iklim agar dapat melindungi petani resiko kegagalan panen akibat bencana alam. **Keenam)** Menciptakan sinergitas kebijakan pemerintah secara terintegrasi dalam mewujudkan kemitraan secara inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, B., Coonrod, J., Ashby, J., & Njiru, W. (2022). The Case for Inclusive Agricultural Development. Chicago Council on Global Affairs, 3–28.
- Badan Pangan Nasional, BPN. 2025. Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023. Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi Badan Pangan Nasional.
- Catriana, Elsa, and Sakina Rakhma Diah Setiawan Setiawan. 2020. "SDA Melimpah, Mengapa Petani Indonesia Sulit Untuk Sejahtera?" Kompas.Com. 2020.
- Davis, B., de la O Campos, A. P., Farrae, M., & Winters, P. (2024). Whither the agricultural productivity-led model? Reconsidering resilient and inclusive rural transformation in the context of agrifood systems. *Global Food Security*, 43(March). <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2024.100812>
- Dewi, M. P. (2020). Strategi Inklusif Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Desa Sembalun. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 210–218. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1169>
- FAO. (2024). The State of Food and Agriculture – 2024; Value-Driven Transformation of Agrifood Systems.
- Fajri, Rahmat. 2025. "Nilai Tukar Petani Aceh Turun 0,80 Persen Pada Januari 2025." Antara News. 2025. <https://aceh.antaranews.com/berita/378333/nilai-tukar-petani-aceh-turun-080-persen-pada-januari-2025>.
- Ilar, G. Y., Cardenas, V. R., Reyes, J. C., & Palis, F. G. (2021). Outcomes and Social Effects of a Community-Based Development Project on Selected Rice-Based Farmers in the Philippines. *Journal of Agriculture and Development (AJAD)*, 18(2), 35–54.
- Krysovaty, A., Ptashchenko, O., Kurtsev, O., & Ovagim, A. (2024). The Concept of Inclusive Economy as a Component of Sustainable Development. *Problemy Ekorożwoju*, 19(1), 164–172. <https://doi.org/10.35784/preko.5755>
- Ngarawula, A. F. B., & Wahyudi, C. (2023). Actor Relationship Model in Empowering Local Farmers Community Base Sustainable Development to Increase Productivity(Study of Social Interaction Between Field Extension Officers and Farmers in Rubaru District, Sumenep Regency). *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 04(11), 27–49. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2023.v4.11.3>
- Siagian, N., Gultom, D. E. M., Pakpahan, D., Sitio, S. R. S., & Siagian, T. M. N. (2023). Pengaruh Pupuk Subsidi dan Produksi Hasil Panen terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. *JlIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2743–2748. <https://doi.org/10.54371/jlup.v6i4.1927>
- Tong, Q., Yuan, X., Zhang, L., Zhang, J., & Li, W. (2024). The impact of livelihood capitals on farmers' adoption of climate-smart agriculture practices: Evidence from rice production in the Jiangnan Plain, China. *Climate Risk Management*, 43(January), 100583. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2023.100583>
- UNDP. (2024). April 2023– March 2024 Supporting Effective Implementation of Agricultural Credit and Insurance Schemes in India (Issue April 2023).
- Yusriadi. (2024). Food Security and Sustainable Development: Overcoming Poverty through Sustainable Agriculture. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(Table 10), 4–6.